

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Heranda Ibnu, S. Subiyanto, A.P. Wijaya.(2015).Pemetaan Zona NilaiTanah Untuk Menentukan Nilai Objek Pajak (NJOP) Menggunakan Sistem Informasi Geografis, *Jurnal Geodesi Undip*, 4(3), 66-77, <https://media.neliti.com/media/publications/80312-ID-none.pdf>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2021.
- Anggara, Sahya dan Endang Soebari. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Biro Pusat Statistik, 2021. Sumber Pendapatan Negara (Milyar Rp), di dapat dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatanNegara.html>. (diakses pada tanggal 13 Maret 2021).
- Hardani, dkk.2020.*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu.
- Mardiasmo.2019.*Perpajakan*.Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marliani, Lina.(2018).Definisi Administrasi dalam Berbagai Sudut Pandang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 17-21, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>. Di akses pada tanggal 4 Maret 2021.
- Muhammad, Tedi. (2017). Efektivitas Peraturan Gubernur Tentang Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 5(2). 4, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/8505>. Di akses pada tanggal 5 Maret 2021)
- Mulyadi.2016. Pengertian Prosedur Di dapat dari https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2415/8/UNIKOM_ULTYA%20AMAL_IYAH_10.BAB%20II.pdf. Di akses pada tanggal 4 Maret 2021).
- Nuraida (2014). Manfaat dan Prinsip Prosedur Di dapat dari <http://digilib.polban.ac.id/files/disk1/167/jbptppolban-gdl-dwinandale-8340-3-bab2--8.pdf>. Diakses pada tanggal 5 April 2021)
- Ompusungu, S.G dan Roy Valiant S. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2). 77-80, <file:///C:/Users/asus%20X453M/Downloads/8045-Article%20Text-22016-2-10-20191027.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2021.

- Pengertian Kebijakan. Di dapat dari <https://kbbi.we.id/bijak>. (Diakses pada tanggal 17 Februari 2021)
- Pengertian Observasi. Di dapat dari <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> (Diakses pada tanggal 23 Februari 2021)
- Pengertian Pajak. Di dapat dari <https://kbbi.we.id/pajak>. (Diakses pada tanggal 10 Desember 2020).
- Pengertian Prosedur. Di dapat dari <https://kbbi.web.id/prosedur>. Html (Di akses pada tanggal 4 Maret 2021).
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12, <https://www.jurnal.uniga.ac.id>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2021.
- Resmi, Siti.2019.*Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifka, R.N.2017. *Step By Step Lancar Membuat SOP*. Yogyakarta: Huta Publisher.
- Royani, Ida. 2020."Tinjauan Sistem Penyimpanan Arsip pada Unit Umum Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu". Laporan Akhir pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya (**Tidak dipublikasikan**)
- Setiawan, Heri. 2016. *Pengantar Ilmu Administrasi [Konsep dan Aplikasi]*. Palembang: CV Citrabooks Indonesia.
- Sumarnani, Wahyu Nuning. 2019. Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal:Litbang Sukowati*. 3(1), 16-27,<https://journal.sragenkab.go.id/index.php/sukowati/article/download/84/48/>. Di akses pada tanggal 10 Maret 2021.
- Tambingon, V.V, Hendrik Manosoh dan Novi S. Budiarmo.(2019).Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Efektivitas Penerimaan di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2017. *Jurnal: Riset Akuntansi Going Concern*.14(1), 80-88, DOI: <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22290.2019> Di akses pada tanggal 4 Maret 2021.
- Taufiqurokhman.2014.*Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Yusi, Syahirman dan Umiyati Idris. 2016. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.

Undang-Undang dan Peraturan:

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.